

PELUANG ATAU TANTANGAN INDONESIA MENUJU *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015*

Dian Wahyudin *)

ABSTRAK

Dalam menghadapi realisasi *Asean Economic Community* 2015, negara-negara anggota *ASEAN* termasuk Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Salah satu perangkat yang perlu dipersiapkan adalah pengaturan pemerintah suatu negara melalui peraturan atau kebijakan (*policy*). Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan (*policy*) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia dan negara-negara anggota *ASEAN* lainnya dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015 kelak. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan bagaimana kesiapan Indonesia dalam hal mengambil peluang dan mengatasi tantangan melalui pengaturan kebijakan guna meningkatkan penerimaan terutama dari sektor ekspor dan impor menuju *Asean Economic Community* 2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis yang menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam persiapan menuju *Asean Economic Community* 2015. Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi lembaga-lembaga negara maupun yang didapat dari internet. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya persiapan untuk mengambil peluang dan mengatasi melalui pengaturan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan terutama dari sektor perpajakan menuju *Asean Economic Community* 2015, walaupun dari segi pelaksanaan belum optimal dan belum menyentuh seluruh segi kehidupan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia harus segera mengoptimalkan pengaturan kebijakan terutama dari sektor perpajakan guna memastikan kesiapan Indonesia bersaing dalam *ASEAN Economic Community* 2015.

Kata Kunci : *ASEAN Economic Community*, Peluang, Tantangan, kebijakan perpajakan

PELUANG ATAU TANTANGAN INDONESIA MENUJU *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015*

A. PENDAHULUAN

Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerja sama ekonomi negara-negara *ASEAN* yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dikalangan negara-negara *ASEAN*. Dalam perkembangannya, pelaksanaan kerjasama ekonomi *ASEAN* berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik, keamanan dan sosial budaya, sehingga mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi *ASEAN (ASEAN Economic Community)*. Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian *ASEAN Economic Community (AEC)* yang berdaya saing dan berperan aktif dalam ekonomi global, sedangkan momentum menuju terwujudnya *AEC 2015* tentunya tidak terlepas dari peranan *ASEAN* sebagai organisasi regional sebagai “kendaraan” untuk mencapai tujuan tersebut.

Alasan terbentuknya *ASEAN*, yaitu untuk membentuk kerja sama dalam meredakan rasa saling curiga, membangun rasa saling percaya, selain itu negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya kerja sama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*, *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, *South East Treaty Organization (SEATO)* dan *Asia and Pacific Council (ASPAC)* serta *Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO)*. Namun pada kenyataannya, organisasi-organisasi tersebut belum dapat meningkatkan integrasi kawasan.

Untuk mengatasi persekutuan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerja sama regional yang lebih kokoh, maka tercetuslah deklarasi tersebut yang dikenal dengan *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*. Upaya-upaya yang dilakukan adalah untuk membangun rasa saling percaya antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif.

Sejak awal pembentukannya, *ASEAN* secara insentif menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Kesepakatan yang menjadi cikal bakal

pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 nanti adalah disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff- ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, lalu kemudian dipercepat menjadi tahun 2003.

Pada tahun 1997, disepakati *ASEAN Vision 2020*, yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Lalu pada tahun 2003, disepakati tiga pilar untuk mewujudkan *ASEAN Vision 2020* yang dipercepat menjadi 2015, yaitu:

1. *ASEAN Economic Community*,
2. *ASEAN Political-Security Community*,
3. *ASEAN Socio-Cultural Community*

Pada bulan Januari 2007, disepakati untuk mempercepat pencapaian *ASEAN Economic Community* (AEC) yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015 dan pada tahun yang sama ditandatangani pula pedoman bagi negara-negara anggota *ASEAN* untuk mencapai *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015, yaitu *AEC Blueprint*. Dimana setiap negara-negara anggota *ASEAN* berkewajiban untuk komitmen dalam *blueprint* tersebut yang berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi *ASEAN*, yaitu:

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui *priority actions* yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan score card. Di samping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. *AEC Blueprint* bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

AEC Blueprint merupakan suatu master plan bagi ASEAN untuk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.

Terkait dengan *AEC Blueprint*, ASEAN juga telah mengembangkan mekanisme Scorecard untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmen negara anggota sebagaimana yang telah disepakati di dalam *AEC Blueprint*. *Scorecard* dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana kemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015.

Terkait dengan implmentasi *AEC Blueprint*, pada tahun 2007-2008, Ditjen Kerjasama ASEAN telah melakukan sosialisasi *AEC Blueprint* bersamaan dengan sosialisasi *ASEAN Charter*, baik di tingkat pusat, khususnya kepada asosiasi-asosiasi bisnis maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, lokakarya maupun Kuliah Umum, wawancara di media massa cetak dan elektronik lokal di pusat dan daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah

untuk memicu kesiapan masyarakat serta menimbulkan mengenai “*public awareness*” mengenai *ASEAN*.

Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar populasinya yang ada di kawasan *ASEAN*. Masyarakat Indonesia adalah Negara *Heterogen* dengan berbagai jenis suku, bahasa dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju *ASEAN Economic Community (AEC)* tahun 2015.

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu bentuk *Free Trade Area (FTA)* dan berlokasi di kawasan Asia Tenggara. *ASEAN Economic Community* yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di *ASEAN* menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara *ASEAN* saat ini. Selain itu juga dengan terwujudnya *ASEAN Economic Community*, dapat menjadikan posisi *ASEAN* menjadi lebih strategis di kancah Internasional. Penulis mengharapkan dengan dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi *ASEAN* ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang nantinya juga saling melengkapi di antara para *stakeholder* sektor ekonomi di negara-negara *ASEAN* dan ini sangatlah penting.

ASEAN Economic Community ini terintegrasi lewat kerja sama ekonomi regional yang diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah, tidak terkecuali perdagangan luar negeri. Indonesia adalah *market* yang cukup besar bagi produsen-produsen suatu produk untuk menawarkan barangnya. Banyak produsen luar negeri beranggapan Indonesia menjadi salah satu sasaran pemasaran yang paling menguntungkan dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.

Dengan diterapkannya *blueprint* perdagangan tanpa batas yang diramal terjadi di tahun 2015 mendatang, tentunya Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan dalam hal perdagangan internasional. Tarif yang hampir 80 % menggunakan *zero percent* tentunya akan mempermudah Indonesia memasuki pangsa pasar bahan baku dari negara tetangga, mengingat tidak semua bahan baku ada di Indonesia. Keadaan ini akan memicu persaingan yang lebih kompetitif baik

dalam lingkup domestik maupun internasional. Di samping itu, nama Indonesia yang dikenal sebagai *market* potensial dengan jumlah penduduk yang besar diharapkan mampu menarik para investor luar negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja di sini pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur kebijakan terhadap para investor agar tidak saja mencari keuntungan, tetapi mampu meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia. Jika pemerintah tidak melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut, beberapa sektor industri akan mengalami titik kelemahan ketika *FTA* benar-benar diimplementasikan.

Negara-negara di *ASEAN* yang dikenal sebagai komoditi ekspor berbasis sumber daya alam terbesar di Asia juga menjadikan peluang dalam persaingan pasar produksi dengan *surplus* pada neraca transaksi. Konsentrasi perdagangan ke luar *ASEAN* memang mengalami penurunan sejak tahun 1993 dari 80 % menjadi sekitar 73 % pada akhir tahun 2008. Keadaan ini berbanding terbalik dengan perdagangan *intra-ASEAN* yang meningkat dari 19 % menjadi 26 % di tahun yang sama. Indonesia yang menjadi salah satu pemain penting dalam percaturan dagang di *ASEAN* memiliki persentase impor yang tidak berimbang dengan ekspor baik dalam lingkup *intra-ASEAN* maupun ke luar *ASEAN*. Keadaan ini harus dipahami oleh pemerintah sehingga nantinya terdapat solusi sebelum perdagangan bebas mendominasi pangsa pasar.

Untuk mencapai semuanya itu, Indonesia harus mulai menyiapkan strategi apa yang dipakai agar mampu bersaing di pasar bebas nanti yang hanya sisa menghitung hari. Tentunya dibutuhkan kesadaran dari masing-masing pribadi apa yang akan dilakukan nanti agar mampu bersaing. Terutama bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan bagaimana ia menuntun masyarakat-masyarakatnya agar mampu bersaing pada pasar bebas nanti dengan negara-negara Asia lainnya.

Strategi-strategi yang bisa dipakai agar mampu bersaing di pasar bebas nanti misalnya lebih meningkatkan pemeriksaan ekspor-impor secara bersih, perlunya stabilitas politik, pemerintah harus bersikap bersih jauh dari korupsi, ketertiban sosial, adanya inovasi teknologi dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dengan adanya strategi-strategi ini diharapkan pada 2015 nanti Indonesia tidak ketinggalan jauh karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang bisa

dimaanfaatkan. Namun untuk mencapai semuanya itu dibutuhkan juga sumber daya manusia yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, meningkatkan pendidikan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebaik-baiknya sehingga meningkatkan pengelolaan produksi bahan baku agar masyarakat Indonesia memiliki standar kesejahteraan ekonomi yang memadai.

Tantangan muncul ketika peluang menghadirkan berbagai risiko di dalamnya. Tantangan yang harus dihadapi Indonesia menghadapi perdagangan bebas tidak hanya berada pada permasalahan domestik, tetapi di dalam lingkup internasional khususnya kawasan Asia Tenggara. Kinerja ekspor menunjukkan Indonesia berada pada peringkat ke-4 di kawasan *ASEAN* di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand di akhir tahun 2008. Di samping itu kinerja impor juga tidak menunjukkan kekuatan Indonesia sebagai negara penghasil bahan baku dengan berada pada peringkat ke-3 di bawah Singapura dan Malaysia di tahun yang sama. Apabila kondisi daya saing tidak segera diperbaiki, defisit terhadap negara-negara tersebut akan semakin membesar dan menjadi ancaman yang sangat serius bagi perekonomian Indonesia. Keadaan ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan memperbaiki produk-produk yang akan diproduksi. Produk-produk yang diciptakan oleh negara-negara *ASEAN* selama ini menunjukkan kesamaan yang akan berakibat pada persaingan yang cenderung *monoton*. Indonesia harus secara teliti melihat keadaan ini sebagai peluang atau tantangan, melihat negara ini memiliki sumber daya alam yang lebih dibandingkan negara-negara *ASEAN* lainnya.

Indonesia dalam KTT *ASEAN* ke-21 di Phnom Penh tahun 2012, ditunjuk sebagai motor penggerak dalam mengintegrasikan kekuatan Asia Tenggara di dunia global. Bersama-sama dengan Singapura dan Thailand, Indonesia berada di baris terdepan dalam mengimplementasikan konsep-konsep yang telah disepakati. Keadaan ini diperkuat dengan optimisme Menteri Perdagangan RI Gita Wiryawan yang menyebutkan bahwa *ASEAN Economic Community (AEC)* ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan pendapatan per kapita. Dengan konsep *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar dalam perekonomian global bersaing dengan blok-blok integrasi lainnya di luar Asia. Tentunya peluang ini

harus dimaksimalkan oleh seluruh negara *ASEAN* dengan persiapan di semua sektor. Tujuan utama dari 10 negara ini adalah tingkat perekonomian yang merata di samping mendapatkan kemudahan akses ekonomi regional. Melihat keadaan memang tidak selalu seperti yang diharapkan.

Persaingan yang terlalu kompetitif memicu kesenjangan ekonomi antar negara. Singapura misalnya, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di *ASEAN* ini tentunya tidak bisa dibandingkan bahkan disamaratakan dengan negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang harus teliti dan cermat dalam “kebebasan” ini. Peluang dan tantangan harus dianalisis, ditanggapi, dan diimplementasikan secara konseptual sehingga nantinya Indonesia tidak hanya menjadi *market* bagi para investor luar saja atau bahasa kerennya menjadi kacung di negara sendiri, melainkan mampu mengendalikan pasar internasional serta dapat mewujudkan perubahan yang berarti bagi kehidupan keseharian masyarakatnya. Pertanyaannya adalah, seberapa “siapkah” Indonesia dalam menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*?

B. PELUANG

Banyak pihak yang menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk menghadapi *ASEAN Economic Community 2015* nanti, namun jika kita bisa lebih jeli melihat peluang-peluang yang ada dengan diberlakukannya *ASEAN Economic Community 2015* nanti, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang perekonomian meningkat tajam. Peluang-peluang tersebut di antaranya :

1. Manfaat Integrasi Ekonomi.

Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk dapat membuka dan membentuk pasar yang lebih luas lagi. Hal ini akan mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan *ASEAN*. Integrasi ekonomi dalam mewujudkan *AEC 2015* akan membentuk pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penyerapan tenaga kerja di kawasan *ASEAN*. Dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan negara-negara *ASEAN* lainnya, Indonesia berpeluang untuk mengirimkan tenaga kerjanya dengan

mempersiapkan peningkatan kualitas dan keterampilan (*Hard skill dan soft skill*). SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan. Cekatan serta inovatif dalam mengambil ide, langkah, dan tindakan. Peningkatan kualitas SDM misalnya dengan pelatihan bahasa. Bahasa sangat penting dalam peranan persaingan global. Terutama bahasa Inggris. Selain itu, pengembangan skill dapat dilakukan dengan pelatihan, *workshop*, pertemuan rutin antarpelaku ekonomi, juga pembangunan *networking*. Semua hal ini dilakukan agar pelaku ekonomi selalu mengikuti perkembangan terbaru perekonomian. Tidak menjadi katak dalam tempurung zona nyamannya. Optimisme Indonesia bisa harus dimiliki para SDM yang berkualitas. Untuk peningkatan *soft skill*, Indonesia dapat mempersiapkan, di antaranya peningkatan kualitas penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang menjadi bahasa pengantar, penguasaan teknologi, yaitu pengetahuan tentang komputer. Peluang yang didapat ketika kita hendak bekerja di Indonesia, kita sudah mengetahui budaya dan bahasa yang digunakan, sementara mungkin para pekerja asing yang hendak masuk Indonesia belum sempat mempelajari itu.

2. Pasar Potensial Dunia.

Penduduk Indonesia menyumbang angka 40 % penduduk *ASEAN* tentu saja merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia dalam menjadi negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar *ASEAN* di masa depan. Sebagai analogi, bayangkan ketika 40 % penduduk *ASEAN*, yaitu penduduk Indonesia menjadi konsumen dari produk-produk negara tetangga (dengan tidak adanya tariff impor yang masuk ke kantong negara). Itu adalah kondisi yang pertama, dan sekarang bayangkan jika 10 %-40 % penduduk *ASEAN*, khususnya penduduk Indonesia, menjadi produsen atau mendirikan UMKM dan melakukan ekspor ke 9 negara *ASEAN* lain (dengan adanya pajak penghasilan, sewa, dan lain-lain yang masuk ke kantong negara) kira-kira pendapatan nasional Indonesia lebih banyak yang mana? Kasus 1 atau kasus 2? Dari analogi yang penulis berikan, bila kita memilih kasus 1, maka kita perlu mempertimbangkan lagi untuk menggunakan uang yang ada secara lebih bijak, karena bisa saja kita akan mengalami inflasi

besar-besaran dalam waktu dekat. Akan tetapi, jika kita memilih kasus 2, maka sudah sepatutnya kita menjadi pemuda calon pemimpin negara ini karena mampu memiliki visi untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Lantas apa yang dapat teman-teman lakukan jika memang saat ini belum mampu menjadi pengusaha? Jawabannya adalah kesediaan untuk memulai dari diri sendiri : (a) Persiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang ada, (b) Kurangi konsumerisme barang-barang impor. (c) Bangga terhadap produk dalam negeri, kalau memang memiliki uang untuk dibelanjakan, belilah produk-produk Indonesia, sehingga uang kita bisa masuk ke kantong negara, dan (d) Perluaslah komunikasi dan *networking*.

3. Negara Tujuan Investor

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar (40 %) di antara Negara anggota *ASEAN*, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari Negara anggota *ASEAN* lainnya. Dengan kerja sama regional untuk meningkatkan infrastruktur (pipa gas, teknologi informasi) membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerjasama regional, terutama dalam melancarkan program perbaikan infrastruktur domestik.

4. Negara Pengekspor

Negara-negara di kawasan *ASEAN* juga dikenal sebagai negara-negara pengekspor baik produk berbasis sumber daya alam maupun berbagai produk elektronik. Dengan meningkatnya harga komoditas internasional, sebagian besar Negara *ASEAN* mencatat surplus pada neraca transaksi berjalan. Prospek perekonomian yang cukup baik juga menyebabkan *ASEAN* menjadi tempat tujuan investasi (penanaman modal). Indonesia sudah mencatat sepuluh komoditi unggulan ekspornya baik ke dunia maupun ke intra-*ASEAN* selama 5 tahun terakhir (2004 -2008) dan sepuluh komoditi ekspor yang potensial untuk semakin ditingkatkan. Komoditi ekspor ke dunia adalah minyak kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, elektronik, produk hasil hutan, karet dan produk

karet, otomotif, alas kaki, kakao, udang dan kopi. Sedangkan komoditi ekspor ke intra-*ASEAN* adalah minyak petroleum mentah, timah, refined copper, batubara, karet, biji kakao dan emas. Disamping itu, Indonesia mempunyai komoditi lainnya yang punya peluang untuk ditingkatkan nilai eksportnya ke dunia adalah peralatan. kantor, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, ikan dan produk perikanan, minyak atsiri, makanan olahan, tanaman obat, peralatan medis serta kulit dan produk kulit. Namun begitu, Indonesia harus teliti dalam mengidentifikasi tujuan pasar yang sesuai dengan segmen pasar dan spesifikasi dan kualitas produk yang dihasilkan.

5. Sektor Jasa yang terbuka

Di bidang jasa, Indonesia yang mempunyai penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Selain itu, Indonesia dapat menjadikan *ASEAN* sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka AEC 2015.

6. Daya Saing

Liberalisasi perdagangan barang *ASEAN* akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan *ASEAN* karena hambatan tarif dan non tarif yang berarti sudah tidak ada lagi. Indonesia sebagai salah satu Negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut didalam negeri.

7. Aliran Modal

AEC 2015 membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal tersebut tidak saja portofolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung (PMA). Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia, berbagai harmonisasi, standarisasi yang telah disetujui. Artinya

akan terjadi proses perbaikan kapasitas di berbagai institusi, sektor maupun peraturan terkait.

C. TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menuju *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, tidak hanya dari dalam negeri saja tetapi yang lebih besar adalah persaingan dengan sesama negara *ASEAN* dan negara di luar *ASEAN* seperti India, Korea dan Cina. Tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia diantaranya adalah :

1. Laju inflasi

Laju inflasi Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara anggota *ASEAN* lainnya. Tingkat kemakmuran Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan juga stabilitas makro menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia.

2. Laju Peningkatan Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor selama periode 2004-2008, Indonesia berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan Thailand. Sedangkan untuk impor, Indonesia sebagai importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia, dan ini merupakan tantangan yang serius karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang defisit terhadap beberapa Negara *ASEAN*. Ancaman yang lebih serius akan datang dari Negara Cina, dimana daya saing Indonesia dari sektor industri petrokimia hulu, baja, tekstil dan produk tekstil, alas kaki serta elektronik belum dapat bersaing dengan produk-produk dari Cina yang harganya relatif lebih murah dibanding dengan produk-produk dalam negeri, jika hal ini dibiarkan maka para pelaku usaha dari sektor industri akan gulung tikar. Hal ini bisa diselamatkan dengan kebijakan pemerintah melalui perpajakan, dengan cara menaikkan tarif impor bagi negara lain yang akan memasarkan produknya di Indonesia dan menurunkan tarif pajak untuk produk-produk dalam negeri, guna menyelamatkan sektor industri.

3. Kesamaan Produk

Dalam hal kesamaan produk, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah dengan meningkatkan nilai tambah bagi produk eksportnya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara *ASEAN* lainnya.

4. Daya saing SDM

Hard skill dan soft skill tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan minimal memenuhi ketentuan standar yang telah disepakati. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra- *ASEAN*, untuk membendung tenaga kerja terampil dari luar sehingga Indonesia tidak menjadi budak di negeri sendiri.

5. Dampak Negatif Arus Modal yang lebih bebas.

Dampak negatif dari arus modal yang lebih bebas dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi aliran modal ke Negara tertentu yang dianggap memberikan potensi keuntungan lebih menarik. Hal ini dapat menimbulkan risiko tersendiri bagi stabilitas makroekonomi Indonesia.

6. Kepentingan Nasional

Harus disadari bahwa kepentingan nasional merupakan yang utama dibandingkan dengan kepentingan kawasan dalam rangka integrasi ekonomi, hal ini berdampak pada sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen liberalisasi *AEC Blueprint*, sehingga perwujudan integrasi ekonomi kawasan akan dicapai dalam waktu yang lebih lama.

7. Kedaulatan Negara

Kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong kinerja ekonomi dalam negeri akan dibatasi dengan adanya integrasi ekonomi *ASEAN*. Ini merupakan pengorbanan yang besar bagi bangsa Indonesia khususnya, karena bagaimana mungkin tidak menggunakan kebijakan fiskal padahal Indonesia menargetkan

pendapatan terbesar bangsa Indonesia yaitu dari sektor perpajakan. Inilah yang harus diasiasi oleh pemerintah Indonesia dalam menyongsong *ASEAN Economic Community 2015*.

D. STRATEGI MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Dalam menghadapi *ASEAN Economic Community 2015* nanti, pemerintah Indonesia mau tidak mau harus melakukan langkah-langkah strategis agar tidak menjadi negara pemasaran bagi produk-produk luar negeri sedangkan untuk investasi, negara lain lebih memilih untuk investasi di negara yang pelaksanaan usahanya sudah meningkat diantaranya Thailand, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam. Untuk itu pemerintah harus melakukan langkah strategis yang dapat dilakukan, di antaranya :

1. Sosialisasi Besar-Besaran

Upaya sosialisasi hajat besar AEC ini menurut saya belum merata. Hanya terbatas kalangan tertentu. Bisa dibayangkan, kalangan menengah ke atas. Sedangkan, masyarakat awam ke bawah tidak begitu mengenalnya. Jangankan bersiap, mengenal pun tidak. Menurut sahabat saya, Tsabita Shabrina, hal ini sangat jauh berbeda dengan yang dia alami di Thailand. Semoga pemerintah segera melakukan sosialisasi ini, tak kalah meriah dengan kampanye pemilu 2014 lengkap dengan atributnya. Jika setiap pilkada maupun pemilihan presiden, tim sukses mampu mengirimkan sms personal maupun *broadcast message* ke hampir semua warga dalam berkampanye, saya rasa hal serupa tak sulit dilakukan untuk menyosialisasikan AEC. "Atmosfir ASEAN dan AEC di Thailand sangatlah terasa. Pemerintah Thailand terlihat tak menganggap remeh pelaksanaan AEC, banyak sekali spanduk, umbul umbul dan papan-papan di berbagai fasilitas umum yang menginformasikan pelaksanaan AEC, media cetak, dan televisi juga aktif mengabarkan berita ini melalui *countdown* yang dihitung mundur setiap harinya. Saya sendiri juga dibuat heran ketika beberapa kali bertemu penjual kaki lima dan penumpang lain di bus yang saya naiki

selalu menanyakan tanggapan saya, sebagai warga negara Indonesia terkait pelaksanaan AEC."

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan ini dapat menciptakan iklim usaha dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Persaingan dalam hal kualitas maupun kuantitas yang bukan hanya untuk pasar lokal dan nasional, tetapi juga ekspor. Semakin banyak UMKM yang bisa mengekspor, akan semakin besar pula daya saing ekonomi Indonesia. Pelatihan penggunaan *website* dalam rangka memperluas segmentasi konsumen juga sangat diperlukan di era digital saat ini. Hal ini yang terkadang masih jarang dilakukan oleh UMKM.

3. Penyediaan Modal

Pemodalan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu usaha. Oleh karenanya, dibutuhkan lembaga pemodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Terutama pelaku UMKM yang seringkali kesulitan dalam penambahan modal

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan hal yang paling krusial dalam menghadapi AEC. SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan. Cekatan serta inovatif dalam mengambil ide, langkah, dan tindakan. Peningkatan kualitas SDM misalnya dengan pelatihan bahasa. Bahasa sangat penting dalam peranan persaingan global. Terutama bahasa Inggris. Selain itu, pengembangan skill dapat dilakukan dengan pelatihan, workshop, pertemuan rutin antar pelaku ekonomi, juga pembangunan networking. Semua hal ini dilakukan agar pelaku ekonomi selalu mengikuti perkembangan terbaru perekonomian. Tidak menjadi katak dalam tempurung zona nyamannya. Optimisme Indonesia bisa harus dimiliki para SDM yang berkualitas!

5. Perbaikan Infrastruktur

Infrastruktur berupa sarana dan prasarana seperti logistik, listrik, telekomunikasi, revitalisasi transportasi, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Kita mengetahui bahwa kesemua faktor ini sangat mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Oleh karenanya, perbaikan infrastruktur ini harus disegerakan. Tersendatnya logistik dapat meningkatkan inflasi. Karena daya saing juga sangat ditentukan cepat lambatnya keluar masuk barang.

6. Reformasi Kelembagaan & Pemerintah

Kelembagaan dan pemerintah yang taat hukum & tidak memihak sangat diharapkan. Sikap kelembagaan & pemerintah yang kooperatif terhadap pelaku usaha merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki. Tidak mempersulit urusan administrasi dan birokrasi yang berkepanjangan. Penguatan lembaga hukum harus ditingkatkan, terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum. Sehingga tercipta iklim kelembagaan hukum yang profesionalisme dan transparan. Upaya peningkatan kesejahteraan kelembagaan & pemerintah juga terus dilaksanakan guna mencegah tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif atau pungli.

7. Reformasi Iklim Investasi

Indonesia harus melakukan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi.

Dari langkah-langkah strategis yang sudah penulis jabarkan, ada beberapa catatan penting yang seharusnya menjadi bahan penyemangat bahwa pada dasarnya Indonesia telah siap dalam menyongsong *ASEAN Economic Community* 2015, diantaranya :

1. Jauh sebelum digadag-gadangkannya AEC 2015, sesungguhnya Indonesia sudah lama bersaing dengan pihak asing, lihat saja ada berapa banyak bank asing yang berdiri di tanah air tercinta kita ini (*jangan lupa lihat tanggal berdirinya*), lihat juga berapa banyak perusahaan migas asing melakukan

eksplorasi di bumi pertiwi ini (*lihat tanggal berdiri dan kontrak eksplorasinya*). Jadi mengapa bilang belum siap, dari dulu juga kita sudah bersaing bukan?

2. Kita bisa lihat beberapa fakta penting, ada berapa BUMN yang dinilai *amburadul* pengelolaannya? Kita fokus saja di PT PLN dan PT KAI! Berapa kali PT PLN melakukan pemadaman bergilir tetapi di satu sisi PT PLN ingin menaikkan tarif dasar listriknya! Lalu bagaimana dengan PT KAI? Coba datang saja ke stasiun-stasiun dan coba naik keretanya! Kedua perusahaan Negara tersebut sudah berpuluh-puluh tahun beroperasi dan dijalankan pemerintah yang diamanatkan oleh UUD'45 pasal 33. Tetapi apakah bila perusahaan tersebut dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat sudah tercapai tujuannya? Bukannya sejahtera tetapi rakyat sendiri dibuat sengsara oleh fasilitas dan layanan yang jauh dari kata "PRIMA"! Harapannya bila Indonesia siap tempur pada AEC 2015 ini, akan ada semangat baru untuk membenahi perusahaan BUMN kita yang masih manja dan terlenta ini!
3. AEC 2015 seakan-akan hanya 11 negara yang berkompetisi di dalamnya? penulis jawab "*Salah besar*"! Ternyata AEC 2015 melibatkan kompetisi hampir separuh populasi di dunia. Faktanya, ada salah satu makalah ilmiah lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia-FEUI bersama dengan bapak chatib bisri (kepala BKPM-Badan Koordinasi Penanaman Modal) dijelaskan pada makalah tersebut bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, yang beliau hadir di Kamboja tersebut. Berita besarnya, KTT tersebut baru saja menerbitkan pakta perdagangan bebas antara ASEAN dan enam negara mitra (Australia, China, India, Jepang, New Zealand, dan Korea Selatan). ASEAN, melalui pakta yang dikenal dengan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* ini sepakat menjalin kerjasama perdagangan dengan melibatkan ke enam negara dinamis tersebut menuju *ASEAN Economic Community (AEC)* per 31 Desember 2015. Komitmen tersebut mengkonsep kerjasama komprehensif dengan ASEAN sebagai pusat. Adapun disebut komprehensif antara lain karena cakupan kerja samanya tidak sebatas perdagangan saja, namun juga menyangkut investasi, peningkatan kapasitas serta jasa. Pakta ASEAN Plus 6 ini menjadi salah satu

pakta perdagangan bebas terbesar di dunia, melibatkan separuh populasi dunia. Ini peluang dan tantangan besar, mengapa harus bilang belum siap? Dari dulu sudah bersaing kan dengan asing di tanah sendiri?

4. Budaya malas dan *comfort zone* yang melanda pemerintah Indonesia harus dibakar dengan adanya AEC 2015 ini, boleh jadi alasan ketidaksiapan, karena mereka yang bilang tidak siap khawatir *comfort zone*-nya terancam dengan adanya AEC 2015. Kita bisa lihat beberapa faktanya, bandingkan saja budaya perusahaan milik pemerintah dengan perusahaan milik asing. ambil contoh perusahaan Bank BUMN dengan Bank Asing, kalau di Bank BUMN dilihat dari segi usia berbanding lurus dengan posisi jabatan, kalau Bank Asing segi prestasi kerja/*achievement* berbanding lurus dengan posisi jabatan. Maksudnya, kalau di Bank BUMN posisi tinggi level manager diisi oleh pegawai-pegawai yang usianya kepala tiga ke atas, yang muda muda belum bisa meskipun *Key Performance Index(KPI)* pegawainya berprestasi dan *capable*, berbeda dengan Bank Asing pegawai baru yang baru menginjak karir 6 bulan tidak menutup kemungkinan bisa mencapai posisi jabatan bergengsi. Mungkin beberapa kasus seperti ini tidak hanya terjadi di perusahaan BUMN berjenis Bank, bisa saja terjadi di seluruh perusahaan BUMN lainnya. Dengan kesiapan Indonesia menghadapi AEC 2015 menjadi batu pemecah akan kebudayaan buruk yang sudah mengakar seperti itu!
5. Ada satu hal lagi terkait banyaknya *statement* “*kita sudah berbahaya dengan asing, khususnya migas kita di dalam negeri yang banyak dikelola oleh perusahaan asing*”. penulis juga ketika itu sangat sepakat dengan pernyataan tersebut. Tapi ada hal yang cukup mencengangkan ketika penulis menyaksikan diskusi publik “*economic challenges*” kebetulan permasalahan yang dibahas terkait “permasalahan habisnya kontrak PT Total EP (perusahaan migas asal Prancis) dalam eksplorasi blok Mahakam”. Ada beberapa panelis yang hadir, yaitu perwakilan dari PT Total EP, PT Pertamina, SKK Migas, dan ekonom Kwik Kian Gie. Durasi diskusi yang cukup panjang dengan berbagai pro kontra antarpanelis membuat diskusi menjadi lebih semarak. Tetapi ternyata ada *statement* menarik, menurut perwakilan SKK migas, pada kontrak bagi hasil yang ditandatangani

perusahaan asing dengan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan migas (terkait PT Total EP) besarnya 83 % (untuk pemerintah Indonesia) dan 17 % (untuk PT Total EP). Dan perlu rekan-rekan ketahui, bagi hasil untuk pemerintah yang besarnya 83 % merupakan bagi hasil tertinggi di ASIA, bahkan Negara komunis China pun masih dibawah pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal bagi hasil yang cukup berani patut diacungi jempol, terlepas dari keinginan rakyat Indonesia yang sebenarnya ingin mandiri dalam pengelolaan migas tanah air kita. Bayangkan PT Total EP hanya mendapatkan 17 % (kecil), belum lagi banyak SDM dalam negeri yang terserap sehingga mengurangi angka pengangguran, kebutuhan migas dalam negeri tercukupi (akhirnya kelangkaan bisa diminimalisir, coba rasakan bila terjadi kelangkaan), bisa terjadinya transfer teknologi dan *knowledge* terkait eksplorasi migas dengan harapan Putra-Putri Indonesia bisa mengelola migas dengan mandiri dan lebih baik. Anggap saja bagi hasil 17 % untuk PT. Total EP sebagai upah *capek* dan dana investasi kita untuk manggulangi kelangkaan, mengurangi angka pengangguran, transfer teknologi, dan keuntungan jangka panjang dan pendek lainnya. Harapannya, ketika AEC 2015 nanti, Indonesia bisa menjadikan motivasi dalam menyiapkan diri dan berbenah diri untuk menjadi bangsa yang mandiri dan walaupun belum bisa, jangan bilang tidak siap, lakukan saja kerjasama dengan kebijakan bagi hasil yang lebih menguntungkan bagi pemerintah Indonesia kalau bisa bagi hasilnya 99 % untuk Indonesia, 1% untuk asing!

6. Perbankan dalam negeri kita yang selalu digembor-gemborkan “Perbankan Indonesia tidak efisien dibandingkan Negara-negara lain perbankan Indonesia paling tidak efisien!” yang menjadi pertanyaan “apakah yang membuat perbankan indonesia tidak efisien?” Salah satunya tingkat persaingan antarbank yang belum terasa dan beberapa bank BUMN mendominasi kekuatan perbankan nasional, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan PBI No.14 tentang *Kepemilikan Saham Bank*, baik asing maupun dalam negeri yang mengerucut pada kesimpulan Bank Indonesia membuka keran derajat keterbukaan yang bertujuan untuk tercapainya *high competitiveness* antarbank di Indonesia, sehingga tidak terjadinya dugaan

kartel suku bunga (penyebab angka ketidakefisienan) yang tidak mengindahkan BI rate. Serta perlu diketahui pula AEC 2015 memiliki *step-step blue print*, dan salah satu *step* agenda pada AEC 2015, di tahun 2020 akan ada *QAB (Qualified ASEAN Banks)*. Kalau kita “Indonesia” selalu bilang tidak siap, belum siap, karena ini itu, mau sampai kapan siapnya? AEC 2015 benar-benar menjadi pecut semangat untuk pembenahan di berbagai sektor, oleh karenanya Indonesia harus berani menghadapi tantangan ini,

7. Belum lagi persoalan sektor pariwisata yang sudah pasti akan menggeliat ketika AEC 2015 tiba, semakin ramainya pariwisata di Indonesia membuat sektor riil bisnis masyarakat pribumi ikut merasakan bulan madunya. Kalau sudah begitu, kementerian pariwisata pun tersulut untuk melakukan revitalisasi dan pembenahan di berbagai lokasi wisata yang ada di seluruh Indonesia. AEC 2015 menjadi alat pembakar jenggot para *decision makers* di pemerintahan Indonesia. AEC 2015 tidak usah ditunda-tunda lagi, Indonesia harus *go on!* Sudah lama Indonesia bagaikan macan ASIA yang tertidur, saatnya bangun dan *trigger*-nya itu adalah AEC 2015.

Sebenarnya masih sangat banyak catatan-catatan penting yang bisa kita gali lagi, mungkin tujuh catatan penting yang penulis ungkapkan di sini bisa mewakili seluruh catatan-catatan penting lainnya yang tidak dituangkan dalam tulisan ini. Penulis mencoba pada posisi netral meskipun Indonesia memiliki kondisi sistemik sehingga merasa belum siap menghadapi AEC 2015, sebenarnya masalah kondisi sistemik tersebut bisa menemukan solusinya ketika kita siap dan tertantang untuk menyongsong AEC 2015. Anggap saja masalah infrastruktur jalan, dengan adanya AEC 2015 kementerian PU pasti tersulut api motivasi dan tergerak dengan sendirinya untuk memperbaiki infrastruktur, bayangkan kalau tidak ada AEC 2015, pasti kementerian PU masih terlena dengan *comfort zone*-nya. Terus masalah kondisi sistemik terkait teknologi, justru dengan adanya AEC 2015, kita bisa banyak belajar dari negara lain lebih leluasa, harapan transfer teknologi disini bisa terbangun. Penulis ibaratkan AEC 2015 itu sebagai sosok korek api yang menyulut jenggot para pemangku kebijakan dan jenggot seluruh rakyat Indonesia, biarkan mereka kebakaran jenggot untuk melakukan berbagai pembenahan, kalau

sudah begitu penulis yakin seluruh permasalahan sistemik yang dialami Indonesia bisa cepat terselesaikan, Ada logika lainnya yang lebih mengarah pada hal sepele terkait daya saing SDM, misalkan penulis menanyakan dihadapan para mahasiswa; *“eh bentar lagi AEC 2015 lho, kalian para mahasiswa bagaimana dengan TOEFL kalian?”* *“eh bentar lagi AEC 2015 lho, akan ada SDM SDM asing berseliweran di Indonesia yang bersaing untuk bekerja di Indonesia, kalian para mahasiswa masih leha-leha belajarnya?”* *“eh bentar lagi AEC 2015 lho, masih malas belajar dan suka nongkrong 4n (ngakak, ngupi, ngudud, ngacang) di tempat tongkrongan?”*. Penulis sangat yakin, kalian para mahasiswa tersebut akan tersentak, dan bagaikan ada api yang membakar jenggot kalian, untuk berbenah diri menjadi pedang yang tajam dan melibas semuanya dan berkata *“Saya pribumi takkan terkalahkan oleh kalian para asing rendahan!”* AEC 2015 juga bisa diibaratkan sumber motivasi baru bagi pribadi pemerintah Indonesia dan pribadi rakyat Indonesia, biasanya ada tipikal orang yang tersulut motivasinya karena orang tua atau bahkan wanita yang dicintainya, sebab itulah AEC 2015 bisa menjadi sumber motivasi baru untuk menyulut motivasi kita semua. Perumpamaan kembali karena AEC 2015 sarat akan persaingan, bila ada dua organisasi yang *label*-nya hampir sama, membuat kedua organisasi tersebut bersemangat untuk menjadi organisasi yang terbaik bahkan jauh lebih baik dari organisasi kompetitornya yang efeknya akan membawa kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Satu lagi, ketidaksiapan Indonesia menghadapi AEC 2015, ibarat sebuah organisasi yang selalu mengalami masalah internal seperti kader, dan ketika dihadapkan sebuah tantangan untuk menyelenggarakan perhelatan event besar, namun dengan yakin dan membusungkan dada tegak, berkata *“kita harus lebih fokus masalah internal kader dulu, event besar belum siap!”* sehingga apa yang terjadi? Masalah internal kader tak kunjung usai dan *event* besar pun tak terlaksana, rugi! Padahal penyelenggaraan event tersebut menjadi sebuah *tools* dalam memecahkan masalah internal kader, event tersebut jadi ajang melatih kader, membangun sebuah kebersamaan, terciptanya rapat-rapat yang mempererat tali silaturahmi! Seharusnya bila event tetap dilaksanakan akan mendapat *“setali tiga uang”*: masalah kader teratasi, event besar terlaksana. Begitu pula dengan AEC 2015 layaknya sebuah event perhelatan akbar yang ingin segera

diselenggarakan oleh organisasi yang bernama Indonesia, namun banyak kalangan yang menyatakan belum siap dan memilih fokus masalah internal (*padahal sejatinya masalah internal akan terus ada*), karena kita masih memiliki masalah internal, padahal sejatinya acara AEC 2015 tersebut bisa menjadi *tools* untuk memperbaiki berbagai macam masalah internal yang ada!

E. SIMPULAN

AEC adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama dari AEC 2015 adalah menjadikan *ASEAN* sebagai pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.

Keterlibatan semua pihak diseluruh Negara anggota *ASEAN* mutlak diperlukan agar dapat mewujudkan *ASEAN* sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas dapat memberikan manfaat bagi seluruh Negara *ASEAN*. Bagi Indonesia, dengan jumlah populasi. Luas dan letak geografi dan nilai PDB terbesar di *ASEAN* harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam AEC 2015 nanti.

Strategi dan persiapan yang selama ini telah dilakukan oleh para stake holder yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi yang diterapkan oleh *ASEAN*, terutama dalam kerangka integrasi ekonomi memang dirasakan masih kurang optimal. Namun hal tersebut memang dilandaskan isu-isu dalam negeri yang membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Disamping itu seiring perkembangan waktu, Indonesia dengan potensi sumber daya yang melimpah telah membawa pergerakannya ke arah yang lebih maju lagi, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengakuan internasional terhadap eksistensi Indonesia di jalur positif.

Dalam tulisan ini, penulis ingin memberikan saran kepada pemerintah Indonesia sebagai bukti bahwa penulis peduli terhadap bangsa Indonesia dalam menyongsong *ASEAN Economic Community 2015*. Saran yang diberikan penulis, di antaranya :

1. Pihak pemerintah, pemerintah selaku regulator dapat menciptakan kebijakan yang bijak dan tepat terutama kebijakan fiskal yang meringankan pengusaha dalam negeri serta sanksi yang tegas bila terjadi pelanggaran terutama yang dilakukan oleh negara lain, jika kebijakan yang diambil baik, insyaAllah meskipun AEC 2015 sarat akan liberalisasi bisa membawa pada arah kebaikan.
2. Pihak swasta, salah satu variabel pemacu perekonomian, agar dapat mematuhi dengan sangat segala kebijakan pemerintah dan terima apa pun sanksinya bila melanggar. Kebijakan dan sanksi merupakan intervensi pemerintah agar berjalan dengan baik sehingga rakyat menjadi lebih sejahtera.
3. Pihak rakyat, jadikan AEC 2015 ini untuk melakukan pembenahan peningkatan kualitas *Human Development Index(HDI)* dan menjadi rakyat yang memiliki pengetahuan dan berdaya saing tinggi sehingga dapat diterima baik dalam negeri maupun luar negeri dan tidak menjadi pembantu di negeri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Das Basu, Sanchita; *Achieving The ASEAN Economic Community 2015*

Triansyah Djani D. 2007. *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Dir. Jen. Kerjasama

ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Media Internet:

<http://www.bps.go.id>

<http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id>

<http://www.kemenperin.go.id>